

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bisa menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga penulis mampu memperkaya teori dengan tujuan dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat saat ini oleh penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Hanifan, (2009) Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Tinjauan Atas Peranan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar”. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan selisih penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya pemeriksaan mengalami perkembangan dalam jumlah wajib pajak yang melaporkan dan juga adanya penurunan selisih penerimaan pendapatan pajak dalam tiga tahun terakhir.

Penelitian sejenis lainnya yang kedua dilakukan oleh Fajar, (2012) ini membahas dan mengkaji tentang “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini, menyimpulkan berdasarkan persepsi pemeriksa pajak, wajib pajak, pemeriksa pajak dan wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dikatakan sudah sangat baik, dengan memenuhi standar pemeriksaan pajak, mengikuti norma pemeriksaan sesuai undang-undang pemeriksaan, dan sudah sesuai dengan prosedur sehingga kepatuhan wajib pajak badan telah masuk dalam kategori baik.

Penelitian sejenis lainnya yang ketiga dilakukan oleh Anggita, (2017) Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang “Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Magelang”. Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya surat ketetapan pajak, maka wajib pajak sebenarnya juga akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu berdasarkan penjelasan dan uraian dari tiga penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Penelitian saat ini mempunyai persamaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pembahasan mengenai pemeriksaan pajak. Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah tahun dan lokasi yang berbeda, tema yang diangkat juga berbeda. Penelitian pertama membahas tentang Tinjauan Atas Peranan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak, penelitian kedua membahas tentang Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, dan penelitian ketiga membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme merupakan sebuah kata serapan yang asalnya dari Yunani yaitu kata *Merchane* artinya instrument, beban, perangkat serta perangkat, kemudian *Merchos* yang artinya metode, teknis dan sarana untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah cara kerja didalam suatu organisasi yang bertujuan untuk saling

mempengaruhi bekerja seperti mesin, dengan harapan ketika satu bergerak maka yang lain mengikuti untuk bergerak juga.

Menurut Wolfman, (2013) mekanisme adalah pandangan interaksi dengan memiliki bagian-bagian yang mencakup secara keseluruhan atau sistem tanpa disengaja menghasilkan fungsi yang sesuai dengan tujuannya.

Menurut Makasudede, (1953) mekanisme dapat diartikan sebagai rangkaian suatu kerja yang dimana hal ini sebuah alat yang digunakan untuk menuntaskan masalah yang berkaitan langsung dengan proses kerja, hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dan juga meminimalisir kegagalan.

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja yang sesuai dengan sistem yang ditentukan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.

2. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lainnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.(Yoseph Agus B.N.N & Bwoga, 2005)

Pemeriksaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara kritis serta sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2004).

Pengertian Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari data, mengumpulkan data serta mengelolah data, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dasar hukum pemeriksaan pajak diatur dalam undang-undang KUP pada Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 (S.R, 2007).

Menurut Mulyadi, (2002) definisi pemeriksaan adalah “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Menurut Ratnawati & Hernawati, (2016) pengertian Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan mengelolah data yang bertujuan untuk diuji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

3. Pengertian Pajak

Beberapa definisi tentang pengertian pajak menurut undang-undang dan para ahli perpajakan dengan sudut pandang yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Adapun beberapa definisi pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terutang dari orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dengan berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu imbalan langsung serta tujuannya digunakan untuk kebutuhan negara yang berguna untuk kemakmuran rakyatnya. Adapun pengertian pajak memiliki beberapa komponen yang perlu diketahui, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Pajak merupakan kontribusi wajib bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
 - 2) Sifat dari pajak adalah MEMAKSA bagi setiap warga negara.

- 3) Warga negara yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan langsung.
 - 4) Pajak sudah di atur dalam perundang-undangan perpajakan.
- b. Menurut Markus, (2005)
- “pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang,wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalty yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya jika ada digunanakan untuk pembangunan serta sebagai instrument/alat untuk mengatur kehidupan social ekonomi masyarakat”.
- c. Menurut Mardiasmo, (2011)
- “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- d. Menurut Djajadiningrat, (2014)
- “pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagaian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum”.

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada warga negara dengan berdasarkan undang-undang yang sudah diatur didalam perpajakan yang gunannya untuk pembiayaan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan negara.

4. Fungsi Pajak

Menurut Ratnawati & Hernawati, (2016) ada dua fungsi utama pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pungutan pajak dapat memberikan sumbangan terbesar bagi kas negara, yaitu mampu memberikan kurang lebih 60%-70% pungutan pajak untuk memenuhi postur APBN. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk dapat membiayai pengeluaran negara secara umum dan rutin maupun membiayai pengeluaran pembangunan negara.

Contoh: penerimaan pajak menjadikan sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Regulereend (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur, yang artinya pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur warga negara atau melakukan suatu kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pemberian insentif pajak yang mampu mendorong meningkatnya investasi dalam negeri.
- 2) Memberikan pungutan yang cukup tinggi terhadap minuman keras bertujuan agar mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
- 3) Pengenaan tarif pajak 0% terhadap ekspor yang dapat mendorong meningkatnya ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ratnawati & Hernawati, (2016) ada beberapa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mempunyai wewenang dan memberikan wewenang tersebut kepada petugas perpajakan dengan tujuan petugas dapat menentukan sendiri jumlah

pajak yang terhutang setiap tahun dengan catatan harus sesuai dengan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, kegiatan menghitung serta inisiatif dalam melakukan pemungutan pajak merupakan hak wewenang sepenuhnya bagi petugas perpajakan. Maka dapat disimpulkan berhasil atau tidaknya proses pelaksanaan pemungutan pajak bergantung terhadap petugas pajak dikarenakan petugas pajak memiliki peran dominan dalam hal ini.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajaknya, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak terhutang setiap tahunnya dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak harus inisiatif menghitung serta memungut pajak karena merupakan wewenang sepenuhnya bagi wajib pajak. Hal ini secara langsung wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajaknya, memperhatikan serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak serta yang utama harus ada dalam wajib pajak ialah harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Adapun wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) Wajib pajak menghitung sendiri besar pajak terhutang.
- 2) Wajib pajak memperhitungkan sendiri besar pajak terhutang.
- 3) Wajib pajak membayar sendiri besar pajak terhutang.
- 4) Wajib pajak melaporkan sendiri besar pajak terhutang.
- 5) Wajib pajak mempertanggungjawabkan besar pajak yang terhutang.

Dari hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan proses pemungutan pajak semua itu tergantung pada wajib pajak itu sendiri karena dimana dalam hal ini wajib pajak mempunyai peran dominan.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem yang dimana wewenang diberikan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penunjukkan terhadap pihak ketiga berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak sesuai dengan sarana perpajakan yang ada. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pemungutan perpajakan bergantung penuh pada pihak ketiga yang sudah ditunjuk.

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Juli Ratnawati (2016) dalam pemungutan pajak ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan, yang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawan pasif

Perlawan pasif merupakan suatu wujud dimana masyarakat wajib pajak mulai enggan untuk membayar pajaknya, faktor penyebabnya dikarenakan oleh:

- 1) Perkembangan intelektual serta moral masyarakat.
- 2) Sulitnya memahami sistem perpajakan yang berlaku.
- 3) Kurang baik dalam melaksanakan pengontrolan sistem pelaksanaan.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif merupakan semua tindakan yang secara langsung wajib pajak menghindari pembayaran pajaknya yang ditunjukkan

kepada para petugas pajak. Adapun hambatan pemungutan pajak terkait perlawanan aktif ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Tax Avoidance*, merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini.
Contoh: jangan membeli produk apabila tidak ingin dikenakan PPN.
- 2) *Tax Evasion*, merupakan tindakan untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku.
Contoh: memanipulasi laporan keuangan.

7. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak memiliki beberapa pengertian menurut para ahli perpajakan dan undang-undang, antara lain:

a. Menurut Mardiasmo, (2013)

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Menurut PMK.02 Nomor 17 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1(2) tentang Tata Cara Pemeriksaan.

“pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah dan keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan dapat menemukan interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan dalam menghitung, serta pemotongan dan pengurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

8. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dengan adanya pengertian pemeriksaan pajak yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak ialah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan tersebut diantaranya adalah untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

Untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi satu atau seluruh jenis pajak hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran SPT, pembukaan atau pencataan serta pemenuhan kewajiban perpajakan (Norman, 2004). Dengan cara ini bertujuan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hal ini yang ada didalam pasal 17B undang-undang KUP.
- 2) Adanya keterangan data konkret sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a undang-undang KUP.
- 3) Wajib pajak wajib menyampaikan SPT pada yang menyatakan lebih bayar, selain pada yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada huruf a
- 4) Wajib pajak dirasa wajib menyampaikan SPT apabila dinyatakan rugi
- 5) Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku

Hal ini dilakukan untuk menguji kepatuhan dengan melaksanakan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.

b. Tujuan lain melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 1) Mengajukan keberatan apabila wajib pajak merasakan hal tersebut

- 2) Untuk menyusun norma perhitungan penghasilan neto dengan cara mengumpulkan bahannya
- 3) Pencocokan data dengan alat keterangan lainnya
- 4) Pemeriksaan bertujuan untuk penagihan pajak
- 5) Wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan jabatan selain itu dilakukan berdasarkan verifikasi

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini tujuannya dapat dilaksanakan pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, pelaksanaan pemeriksaan yang standar, serta standar pelaksanaan pelaporan pemeriksaan. Standar ini bersifat pribadi serta berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya.

9. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang dimana didalamnya meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Juli Ratnawati (2016).

Menurut Juli Ratnawati (2016) ada beberapa jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP), antara lain:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan berapa besar jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit, besarnya sanksi administrasi serta jumlah pajak yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar diterbitkan apabila:

- 1) Pajak yang belum di bayar atau pajak terutang setelah dilakukannya pemeriksaan
- 2) Adanya surat pemberitahuan yang tidak disampaikan disaat waktu yang sudah ditetapkan Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang

mewah yang ternyata seharusnya tidak dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak dikenai tarif 0%

- 3) Besarnya pajak yang terutang karena tidak diketahuinya tentang kewajiban menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan
- 4) Kepada Wajib Pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan juga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang berhak menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditentukan. SKPKBT diterbitkan apabila jika ada data baru yang dimana data tersebut mengakibatkan jumlah pajak terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam penerbitan yang telah ditemukan.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dikarenakan jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak yang terutang atau bahkan yang seharusnya tidak terutang

Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan untuk:

- 1) Pajak penghasilan ketika jumlah kredit pajak lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang terutang
- 2) Pajak pertambahan nilai ketika jumlah pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak terutang. Apabila terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah tersebut dihitung dengan menggunakan cara menjumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak yang dipungut oleh petugas tersebut.
- 3) Pajak penjualan atas barang mewah ketika jumlah pajak yang dibayar lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak terutang

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah surat ketetapan pajak yang dimana bisa menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang serta tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah dijalankan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

10. Kewajiban Perpajakan

Kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi disaat melaksanakan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
- 2) Memperlihatkan serta meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasaran untuk pemeriksaan.
- 3) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
- 4) Memberikan keterangan lain secara lisan maupun tertulis
- 5) Mendatangani berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak

Sedangkan hak-hak yang diperoleh wajib pajak saat terlaksananya pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Meminta surat perintah pemeriksaan
- 2) Mendapatkan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- 3) Melihat tanda pengenal pemeriksa.